

PROSPEKTIF PESANTREN DALAM KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA MULTIKULTURAL MASYARAKAT INDONESIA

Abu Amar Bustomi

Dosen STAI Salahuddin Pasuruan

aa.bustomi@yahoo.com

Abstrak

Keragaman (pluralitas) merupakan realitas (sunnatullah) yang tidak dapat dihindari, baik pluralitas dalam hal agama, etnik maupun budaya masyarakat. Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*), baik secara vertikal maupun horisontal. Di Indonesia, wacana kerukunan dan toleransi antar umat beragama telah menyedot banyak energi dan pikiran. Fenomena disharmoni ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama, yang secara kategoris simplistik dilatarbelakangi oleh faktor internal (faham radikal-exstrim & *fundamental-subjektif* terhadap ajaran yang dianut) dan eksternal (sikap *bedonitas* dan *oportunitas* yang mengatasnamakan agama untuk komoditas kepentingan) telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, pluraritas agama menjadi perhatian yang penting bagi masyarakat Indonesia. Jika dikaitkan dengan cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru dengan merombak keseluruhan tatanan kehidupan sebagai masyarakat multikultural Indonesia (keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan), maka tradisi dan pendidikan di pesantren yang memiliki suasana dialogis di antara komunitas pesantren dengan lingkungan masyarakat sekitar dari berbagai karakter dan latar belakang, eksistensi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, merupakan potensi yang sangat memungkinkankan untuk melakukan proses rekayasa sosial (*social engenering*) penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multicultural, dengan paradigma dan orientasi inklusif, pendekatan dan metodologi institusi pendidikan yang mengkonstruksi dan melestarikan toleransi dan koeksistensi antar pemeluk agama, antarbudaya, antarsuku, dan antargolongan.

Kata Kunci: Prospektif Pesantren, Konstruksi Sosial Budaya, Multikultural

A. Pendahuluan

Memahami Realitas Bangsa.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa keragaman (pluralitas) merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, baik pluralitas dalam hal agama, etnik maupun budaya masyarakat. Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada, bukti kemajemukan ini juga dapat dibuktikan melalui semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Masyarakat Indonesia yang plural,

dilandasi oleh berbagai perbedaan, baik horisontal maupun vertikal. Perbedaan horisontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sementara perbedaan yang bersifat vertikal yakni menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah, yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Konflik dan pertikaian sebenarnya tidak hanya terjadi pada masyarakat plural, namun terjadi pula pada masyarakat yang relatif homogen. Namun yang pasti masyarakat plural

(heterogen) relatif lebih sering mengalami konflik daripada masyarakat yang homogen. Masyarakat Jepang relatif jarang terjadi konflik, karena karakteristik homogenya, berbeda dengan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, wacana kerukunan dan toleransi antar umat beragama telah menyedot banyak energi dan pikiran. Fenomena disharmoni ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama. Ketidakharmonisan antar pemeluk agama, secara kategoris simplistik dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan faham keagamaan terhadap ajaran agamanya. Seperti kecenderungan faham *radikal-ekstrim* dan *fundamental-subjektif* terhadap ajaran yang dianut. Demikian pula sikap *eksklusifisme*, *literalisme* dan kesalahpahaman. Selain itu sikap *bedonitas* dan *oportunitas* sebagai faktor eksternal dengan mengatasnamakan agama untuk komoditas kepentingan, telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Dalam konteks inilah, pluraritas agama menjadi perhatian yang penting bagi masyarakat Indonesia. Terlebih jika kita melihat relitas bangsa, bahwa agama-agama besar di dunia, selain Yahudi, dapat hidup dan berkembang di Indonesia¹

Mengingat secara geografis bangsa Indonesia terdiri belasan ribu kepulauan, maka pluralitas agama bisa dipastikan melahirkan tradisi budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini melahirkan implikasi yang dilematis. Pada satu sisi, keragaman ini akan melahirkan dinamika sosial yang ditandai dengan adanya kompetisi sosial dalam berbagai lapangan kehidupan, dan yang demikian bisa menjadi kekuatan pendorong lahirnya berbagai kreativitas sosial, sehingga terwujud pembaharuan dalam berfikir maupun bertindak. Namun pada sisi yang lain keragaman beragama apabila tidak mampu dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber konflik sosial dengan kepekaan/sensitivitas yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, suatu hal yang paradoks mungkin

terjadi, globalisasi yang seharusnya membawa arah positif (integrasi) ternyata juga terdapat indikasi-indikasi disintegrasi. Proses global yang direfleksi oleh masyarakat akan memunculkan tanggapan yang berbeda, hal ini akan memunculkan resistensi yang berdampak disintegrasi, atau terlihat pula dari adaptasi-adaptasi yang dilakukan masyarakat terhadap berbagai pengaruh globalisasi.

Globalisasi pada dasarnya telah melahirkan suatu jenis ideologi yang menjadi embrio pembentukan, pelestarian dan perubahan dasar masyarakat yang bertumpu pada proses identifikasi diri dan pembentukan perbedaan antara orang. Dalam hal ini kapitalisme akan menjadi kekuatan penting (apalagi setelah runtuhnya komunisme dan sosialisme) yang mengarah pada pembentukan status dengan simbol-simbol modernitas yang menegaskan nilai-nilai autentik.

Modernisasi akan membawa masyarakat ke dalam proses estetisasi kehidupan, yakni menguatnya kecenderungan hidup sebagai proses seni, produk yang dikonsumsi tidak lagi dilihat dari fungsi, namun dari simbol yang berkaitan dengan identitas dan status. Dalam hal ini sesuatu yang semula memiliki nilai etik akan cenderung bergeser ke estetik. Pada saat ini Georg Simmel dikutip Abdullah (2002) menyebut agama sebagai *the work of art*, agama menjadi *private of business*.

Akhir-akhir ini dampak dari globalisasi sudah semakin terasa dalam berbagai bidang kehidupan, baik hubungan antar negara, bangsa, apalagi suku atau etnis. Hubungan antar orang yang berlatar belakang agama, bangsa, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda semakin intens. Bentuk-bentuk komunikasi pun semakin bervariasi dan banyak pilihan, terutama sebagai akibat kemajuan teknologi informasi (*information technology*). Setiap orang dapat berkomunikasi secara efisien, murah dan cepat, seperti komunikasi melalui fasilitas elektronik, seperti TV, internet, email, dan lain-lain. Dahulu, sebelum era kemajuan teknologi informasi, orang bisa saja melakukan pembatasan-pembatasan atau bentuk-bentuk proteksi lainnya untuk—misalnya—membatasi pergaulan dengan kelompok atau bangsa tertentu. Namun, pada saat sekarang ini, cara-cara seperti itu sudah tidak mungkin lagi ditempuh. Pilihan-

1 Al-Munawar, 2003

pilihan bentuk dan alat komunikasi sudah demikian luas. Bahkan karenanya, pergaulan antar manusia, suku bangsa dan negara sudah sedemikian bebas dan terbuka. Di satu sisi fenomena kemajuan ini mendatangkan kemudahan-kemudahan; namun di sisi lain liberalisasi yang muncul dari globalisasi ini harus dapat diantisipasi agar tidak malah mengakibatkan munculnya kesulitan-kesulitan baru dalam kehidupan manusia. Banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai eksistensi kemajuan ini. Kendatipun demikian, bagaimanapun, hubungan kemanusiaan dengan siapapun dan kapanpun harus tetap dijaga untuk saling memahami, menghargai dan atau menghormati satu dengan lain agar terjadi suasana harmoni. Dalam hal ini, dunia yang sedang kita jalani dan alami ini—di sudut manapun—tidak bisa mengelak dari sifat multikulturalnya.

B. Konsep Dan Konteks Multikulturalisme Di Indonesia

Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (*plural society*). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia²

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam

kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan³. Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat (termasuk masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam mozaik masyarakat. Di dalam mozaik tercakup unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang lebih kecil, yang membentuk masyarakat yang lebih besar, yang memiliki kebudayaan (Reed, ed. 1997 dikutip Suparlan, 1999). Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan kebudayaan bangsa, seperti yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Walaupun multikulturalisme telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia, namun realitasnya konsep ini masih terkesan asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, namun multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Oleh karena itu, ulasan multikulturalisme, mau tidak mau, juga akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yakni politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat mutu produktivitas.

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat maka sampai dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yakni kebudayaan Kulit Putih yang Kristen. Golongan lain yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan kalangan minoritas dengan segala hak yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarangnya

2 Suparlan 2001

3 Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000 dikutip Suparlan, 2002

perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan Berwarna di tempat-tempat umum, yang dilanjutkan munculnya perjuangan Hak-Hak Sipil melalui berbagai kegiatan *affirmative action* yang membantu mereka yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalannya dari golongan Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam bidang pekerjaan dan usaha (Suparlan 1999).

Di tahun 1970an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan Kulit Putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dengan corak kebudayaan orang Kulit Hitam, orang Indian atau Pribumi Amerika, dan kebudayaan-kebudayaan bangsa serta sukubangsa yang tergolong minoritas. Untuk mengatasi masalah ini, para cendekiawan dan pejabat pemerintah pro demokrasi dan HAM, yang anti rasisme-diskriminasi melakukan proses penyebarluasan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970an. Bahkan anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan sukubangsa lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibunya di sekolah sampai dengan tahap-tahap tertentu (Nieto 1992 dikutip Suparlan, 1999). Jadi kalau Glazer (1997) mengatakan bahwa *'we are all multiculturalists now'* dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970an (Suparlan, 1999).

Multikulturalisme dalam hal ini bukan hanya sebuah wacana namun sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep dalam bentuk bangunan konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan pemahaman dan pengembangan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta fungsinya dalam kehidupan manusia. Bangunan

konsep ini harus dikomunikasikan antar para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkannya. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lain yang relevan (Fay 1996, Rex 1985, Suparlan 2002).

Jika akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, maka pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan (disenergiskan) antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai ahli lainnya. Demikian pula karena multikulturalisme merupakan ideologi dan alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia dan operasionalitasnya melalui pranata-pranata sosial.

Selanjutnya sebagai sebuah ide atau ideology, multikulturalisme akan terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bisnis, politik, serta kegiatan lain dalam masyarakat, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan. Dalam upaya ini, perlu adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman budaya lokal maupun nasional serta berbagai corak dinamikanya.

C. Konsep Multikultural Dalam Pemahaman Agama.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang konsep multikultural dalam

kehidupan pesantren dan masyarakat, maka kita kembali pada beberapa prinsip pokok; (1) Islam adalah agama yang bersifat universal. Islam bukan diperuntukkan bagi salah satu suku bangsa, etnis, tertentu, atau golongan tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*; (2) Islam menghargai agama-agama dan kepercayaan agama lain. Islam juga mengajarkan tidak ada pemaksaan dalam beragama; (3) Islam juga merupakan agama yang terbuka untuk diuji kebenarannya; (4) Islam juga menegaskan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan umat manusia adalah alamiah, perbedaan itu mulai dari jenis kelamin, suku, dan bangsa yang beraneka ragam. Perbedaan itu agar terjadi saling mengenal; (5) Islam memiliki sejarah yang cukup jelas terkait dengan kehidupan yang majemuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri ketika membangun masyarakat madani di Madinah. Sebagai sebuah negara (waktu itu masih berbentuk negara kota—*city state*—dan belum menjadi negara bangsa—*nation state*), madinah sudah mengakui, menghargai, dan mengakomodasi berbagai etnik dan berbagai golongan. Semua warga negara menikmati hak hidup dan dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah (*Madinah Charter*). Prinsip-prinsip dasar seperti ini, merupakan pemahaman yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan pendidikan multikultural.

Atas dasar beberapa prinsip tersebut di atas, maka sesungguhnya Islam sendiri pada dasarnya memberikan ruang yang seluas-luas pada pendidikan multikultural. Bahwa perbedaan-perbedaan itu justru telah dijelaskan sendiri oleh al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa Allah bukannya tidak mampu membikin umat manusia ini menjadi satu umat saja, melainkan dijadikan berbedabeda atau bergolong-golongan agar setiap orang atau setiap golongan dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Di samping itu, dalam ayat lain, Allah memang secara alamiah menjadikan umat manusia itu berbangsa-bangsa (*syn'uban*) dan berkelompok-kelompok (*qaba'ilan*), agar mereka saling mengenal. Oleh karena itu, tidak selayaknya ditutup-tutupi, apalagi diingkari adanya kelompok-kelompok itu. Sebagai ajaran yang terbuka, juga tidak selayaknya para umatnya memiliki rasa takut untuk terpengaruh oleh ajaran lain. Ketakutan dapat dimaknai

sebagai penyandang mental kalah atau ekspresi penyakit rendah diri (*inferiority complex*) yang seharusnya dihindari oleh umat Islam. Atas dasar keyakinan yang kokoh, maka Islam memberikan kebebasan umatnya bergaul secara bebas dan terbuka dalam pentas pergaulan umat manusia sejagat. Rasulullah, pernah berkirim surat ke raja Heraklius, untuk memperkenalkan ajaran Islam. Oleh karena itu konsep pendidikan multikultural bukan malah di jauhi, melainkan sebaliknya harus dihadapi secara obyektif dan penuh percaya diri. Di sinilah para pendidik Islam membuktikan bahwa Islam dapat mewujudkan rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk menyebarkan rahmat kepada setiap manusia dengan berbagai latar belakang kultural.

Pendidikan multikultural, bukan bias tauhid atau mentauhidkan beberapa ajaran agama menjadi suatu agama baru. Namun pendidikan multikultural terbatas pada pengembangan prinsip-prinsip dasar pergaulan antarsesama manusia (*ukhuwah basyariah/ muamalah*). Oleh karena itu dalam konteks maupun kontennya, semangat multikultural dapat diintegrasikan secara langsung dalam kontens kurikulum dan dikontektualisasikan dalam bentuk pendekatan maupun metodologi yang strategis, pragmatis dan relevan, dengan didukung hardware, serta penyiapan, pembinaan dan pengembangan manajemen dan SDM yang memadai dalam kehidupan pesantren dan masyarakat.

Dalam konteks pluralitas sosial, Islam mengajarkan prinsip-prinsip: (1) kasih sayang antar sesama, (2) saling mengenal, (3) saling menghargai, (4) saling tolong menolong. Sebaliknya, Islam melarang bertindak merendahkan orang lain, bermusuhan-musuhan, apalagi saling membinasakan, karena dalam pandangan Islam, menghina manusia sama dengan merendahkan ciptaan manusia yang termulia. Islam melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi, lebih-lebih menumpahkan darah, menghilangkan nyawa dengan alasan yang tidak benar. Islam mengkategorikan tindakan membunuh atau menumpahkan darah tanpa alasan yang benar sebagai dosa besar. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa sama artinya dengan membunuh seluruh manusia. Konsep Islam tentang tata pergaulan seperti ini mesti

dikedepankan sebagai basis dalam mengembangkan pendidikan.

Di lingkungan pesantren, pengembangan pendidikan dengan kesadaran multicultural, masih tergolong baru. Walaupun sesungguhnya dalam tataran doktrin yang bersumber dari ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Hadis, sejak diturunkan ajaran ini, sudah diperkenalkan. Hanya saja, oleh karena gejala hidup multikultural merupakan fenomena baru, setidak-tidaknya di Indonesia, maka pro dan kontra selalu akan terjadi, sebab hal yang demikian sudah menjadi kelaziman tatkala hal-hal baru diperkenalkan atau terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi, sebagaimana lazimnya perubahan itu *tokh* akhirnya akan diterima jika hal itu sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi.

Tidak terlalu berlebihan kiranya, ketika kita memiliki faham bahwa jika agama-agama diberikan secara terbuka, maka justru akan memperkokoh keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk. Cara-cara yang dilakukan sebagian masyarakat untuk melakukan proteksi berlebihan, malah justru akan menjadikan miskin informasi tentang dunia luar, dan akan memiliki efek yang membahayakan. Dalam beragama, bahwa meyakini hanya agamanya sendirilah yang paling benar (sebagai bentuk klaim kebenaran, *truth claim*) adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, semestinya keyakinan seperti itu tidak harus merendahkan agama—atau meniadakan hak hidup keyakinan lain—lebih-lebih jika bertindak demikian kepada orang yang memeluk agama lain. Yang dipentingkan adalah bahwa pengakuan membenarkan agama sendiri dibekali oleh tanggung jawab, baik bersumber kitab suci atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibangunnya. Berangkat dari pandangan ini, maka kita akan dapat terhindar dari sikap keberagamaan yang hanya bersifat ikut-ikutan. Bahkan jika kita mau sadari sepenuhnya, Islam mengajarkan umatnya agar beragama secara sungguh-sungguh atau *kaffah*. Artinya, dalam beragama, Islam tidak menghendaki beragama secara setengah-setengah. Islam yang *kaffah* adalah Islam yang secara kumulatif mendatangkan kebaikan, kebersamaan, kedamaian, keadilan, dan keamanan bersama.

D. Pendidikan Pesantren; Kontruksi Sosial Budaya Multikultural Masyarakat.

Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, mungkinkah konstruksi sosial budaya multikultural masyarakat dikembangkan melalui kontekstualisasi pendidikan multiKultural dalam lingkungan pesantren. Sementara stigma yang berkembang adalah bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan agama—seperti halnya *civil education*—di institusi-institusi pendidikan yang sering dikesankan sebagai sistem rekayasa sosial pendidikan yang bercorak dogmatis, doktriner, monolitik, dan tidak berwawasan multikultural. Agama di satu sisi membentuk tipe-tipe kultur masyarakat; bahkan, membentuk kultur yang begitu khas sehingga secara sosiologis sering muncul dalam bentuknya yang sangat eksklusif. Agama manapun kemudian menampilkan corak kultural pemeluknya yang khas dan eksklusif pula.

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional, lembaga sosial dan penyiaran agama (Mastuhu, 1994) yang dewasa ini banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, baik dari kalangan “luar” maupun “dalam” pesantren. Hal ini memberikan nilai lebih bagi pesantren dalam hubungannya dengan penegasan eksistensi kelembagaan yang telah mampu berperan secara positif dalam kehidupan berbangsa selama ini.

Selain itu, perhatian tersebut akan menghidupkan suasana dialogis di antara komunitas pesantren yang banyak terlupakan pada masa belakangan ini. Padahal apabila diamati, pesantren sejak berdirinya senantiasa berupaya berdialog dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedudukannya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat tidak memungkinkan pesantren untuk tampil terisolir, apalagi eksklusif (Mahfudz, 1994).

Filosofi lahirnya pesantren menurut sementara kalangan, sama persis seperti filosofi wujudnya pasar sebagai tempat jual beli, di mana para pembeli dan penjual tidak dapat begitu saja “dipaksa” menempati pasar tersebut. Namun interaksi antara pembeli dan penjual itu sendiri yang menciptakan tempat yang disebut pasar. Gambaran seperti itulah yang semula

melahirkan pesantren. Dan ini merupakan cermin intensifnya dialog antara pesantren dengan lingkungannya.

Dialog ini tercipta secara alamiah, karena berdirinya pesantren adalah kehendak masyarakat. Justru tidak masuk akal, apabila pesantren tidak dapat berdialog dengan “pemilik”-nya sendiri. Tidak pernah tersebut dalam sejarah, bahwa pesantren adalah hasil paket dari kalangan tertentu. Dengan demikian, setidaknya ada dua hal yang mendukung terciptanya fenomena dialogis pesantren dengan masyarakat. Pertama, karena tempat dan kedudukannya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kedua, pendirian pesantren itu sendiri berasal dari karsa masyarakat yang membutuhkan kehadirannya.

Dengan demikian, sasaran pesantren sebenarnya adalah masyarakat luas. Keberadaan pesantren di tengah masyarakat sebagai suatu lingkungan kehidupan, pada hakikatnya membawa sebuah misi yaitu upaya merangkul kehidupan dalam jalinan nilai-nilai sepirtual dan moralitas yang Islami. Selanjutnya pesantren dalam hal ini, akan berfungsi sebagai kontrol dan sekaligus stabilisator dalam proses perkembangan masyarakat yang sering menimbulkan ketimpangan sosial maupun kultural. Dan jika terjadi ketimpangan, maka pesantren sudah barang tentu akan menjadi sasaran kritik dan gugatan.

Posisi pesantren yang sedemikian strategis dalam membangun dialog dengan masyarakat, dapat menjadi potensi besar dalam rangka membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan menghargai antar elemen masyarakat dari berbagai karakter dan latar belakangnya. Salah satu yang bisa dilakukan pesantren adalah membangun toleransi antar umat beragama. Sebuah toleransi yang dibangun atas dasar kesadaran bersama akan pluralitas agama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Sebuah kesadaran bahwa pluralitas keagamaan di mana pun di dunia ini, kecuali di tempat-tempat tertentu, adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak-kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok masyarakat

yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Benarlah jika dikatakan bahwa pluralitas keagamaan, sebagaimana pluralitas-pluralitas lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural, dan pluralitas bahasa, adalah semacam hukum alam. Artinya, mengingkari pluralitas keagamaan sama dengan mengingkari hukum alam (Sirry, 2004).

Menyadari potensi di atas pada dasarnya pesantren sebagai institusi sosial pendidikan dan keagamaan, berarti sangat memungkinkan untuk melakukan proses penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multikultural. Proses ini pada hakekatnya tetap berbasis pada pesantren sebagai *civil education*, yang memiliki potensi untuk melakukan proses rekayasa sosial (*social engenering*) dengan hanya membalik paradigma atau orientasinya yang eksklusif menjadi inklusif, yang tadinya masih bersifat doktriner, dogmatis, dan tidak berwawasan multikultural, diubah orientasinya—juga pendekatan dan metodologinya—agar menjadi institusi pendidikan yang tidak malah justru memunculkan ekses negatif, yakni permusuhan antaragama, antarbudaya, antarsuku, dan antargolongan. Di Barat, perbedaan kultur menyebabkan konflik, sehingga di sana gagasannya adalah pendidikan multikultural. Di Indonesia, pemicu konflik seringkali bersumber dari perbedaan keagamaan, baik antaragama maupun interagama. Atas dasar ini maka pendidikan agama berwawasan agama-agama menjadi sangat penting. Artinya, pendidikan harus memberi ruang bagi eksistensi, pengakuan, dan penghormatan kepada agama-agama lain (Suprayogo).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2002, *Globalisasi Gaya Hidup dan Komodifikasi Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2002.
- Al Munawar, Said Agil Husain, 2003, *Fiqih Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Ciputat Press.

- Jary, David dan Julia Jary, 1991, "Multiculturalism". Hal.319. *Dictionary of Sociology*. New York: Harper. Dikutip Suparlan, 2001.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta, 1994.
- Mahfudz, M.A. Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta. LkiS.
- Nieto, Sonia. 1992. *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman. Dikutip Suparlan, 2001.
- Reed, Ishmed (ed.). *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin. Dikutip Suparlan, 2001.
- Rex, John, 1985. "The Concept of Multicultural Society". Occasional Paper in Ethnic Relations, No. 3. Centre for Research in Ethnic Relations (CRER). Dikutip Suparlan, 2001.
- Sirri, Mun'im A (Ed.). 2004. *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta. Paramadina.
- Suprayogo, Imam. *Pendidikan Agama Multikultural*. Makalah. Tanpa Tahun.
- Suparlan, Parsudi. 2001a. "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?" makalah disampaikan dalam Seminar.
- _____. 2001b, "Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme". *Harian Media Indonesia*, 10 Desember 2001.
- _____. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Ziemek, Malfred. 1986. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* (Terj. Boetje Soedjojo). Jakarta. P3M.

